

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Berbicara mengenai demokrasi tidak lepas dari Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan suatu manifestasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh suatu negara. Partai politik sebagai suatu organisasi yang secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri tentang partai politik diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 perubahan dari UU No. 2 Tahun 2008.

Oleh karenanya partai politik dikatakan sebagai satu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>2</sup> Karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan

<sup>1</sup> Ichlasul Amal, *Teory Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta : Tiara Mutiara, 1996), hal. xi

<sup>2</sup> Miriam Budihardjo, *Partisipasi dan Partai Politik-sebuah bunga rampai*, (Jakarta : PT Gramedia, 1981), hal. 14

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik untuk di pilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Prinsip-prinsip ini dikemukakan oleh Mark N. Hagopian sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Bilal dalam skripsinya yang berjudul Partai Politik dan Penguatan Hak Politik Sipil, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.<sup>3</sup> Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Implementasi kehidupan demokrasi, keberadaan partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>

Eksistensi demokrasi memberikan asumsi bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik. Dalam perspektif ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti

<sup>3</sup> Muhammad Bilal, *Skripsi: Partai Politik Dan Penguatan Hak Politik Sipil (Studi Atas Peran Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam Penguatan Hak Politik Sipil Paska Pemilu 1999)*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2004), hal. 1-2.

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik hal. 2

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memahami masalah politik kenegaraan dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>5</sup>

Indonesia yang menganut sistem demokrasi, yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat termasuk dalam hal memilih pemimpin, baik itu Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden), Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati), begitu juga dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di tingkat pusat disebut anggota DPR RI dan ditingkat daerah disebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yakni DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

DPR/DPRD yang merupakan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga melalui pemilihan umum, dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat dalam bentuk lembaga dan proses pemerintahan.<sup>6</sup>

DPR dikenal juga dengan badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kehendak. Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang *authentic*. Karena itu keputusan-keputusannya, baik bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Miriam Budihardjo, *Op.Cit.*, hal. 3

<sup>6</sup> Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.175

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Op, Cit.*, hal. 315

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara historis perkembangan pola pemilihan anggota badan legislatif dari masa ke masa, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1977-1997, komposisi Anggota DPR terdiri dari tiga partai, yaitu Golkar, PPP dan PDI.<sup>8</sup>

Periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa reformasi yang terdiri dari 21 partai dan melahirkan 7 partai besar, yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PK, dan PBB.<sup>9</sup>

Kemudian pada periode 2004, hasil pemilu anggota DPR terdiri dari 16 partai dan partai yang memperoleh kursi terbanyak ada 7 partai, yaitu Golkar (128 kursi), PDIP (109 kursi), PPP (58 kursi), Partai Demokrat (57 kursi), PAN (52 kursi), dan PKB (52 kursi).<sup>10</sup>

Untuk menjadi seorang anggota DPRD harus melalui tahap pencalonan dan pengusungan dari partai politik yang ikut serta dalam pemilihan legislatif (Pileg), kemudian setelah lolos dan resmi diusung oleh partai barulah menjadi calon anggota legislatif yang nantinya akan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Bukanlah hal mudah demi terwujudnya keinginan menjadi seorang anggota DPR/DPRD, perlu memiliki rencana dan strategi yang matang, baik itu strategi secara pribadi maupun dari partai pengusung.

Perkembangan mutakhir politik Indonesia menunjukkan bahwa agama merupakan satu institusi politik paling penting dalam sistem Pancasila.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 341

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 341

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 343

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab, dari agamalah para politisi coba memusatkan atau mencari legitimasi mereka, baik secara langsung ataupun tidak. Agama dipergunakan sebagai sumber bagi ketajaman-ketajaman moral dan keputusan-keputusan terhadap rakyat, yang merupakan basis dari masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Strategi politik setiap partai politik menjadi tonggak utama menuju keberhasilan meraih suara agar para calonnya menjadi peraih suara terbanyak sebagai syarat mutlak untuk menjadi seorang anggota legislatif, baik itu strategi komunikasi terhadap masyarakat pemilih, strategi pendekatan masyarakat, strategi pemilihan kader terbaik sebagai calon legislatif dari partai pengusung maupun strategi kampanye setiap partai politik.

Dalam persoalan ini, tentu saja kita harus mengulas terlebih dahulu apa itu strategi politik, dari segi bahasa dikutip dari wikipedia indonesia strategi memiliki makna yaitu rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah "kemenangan", secara umum dapat disimpulkan strategi memiliki makna upaya menyusun perencanaan dengan langkah-langkah sistematis guna memenangkan suatu pertempuran secara politis. Sedangkan Strategi politik sendiri memiliki makna yaitu suatu strategi yang digunakan untuk meralisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih

<sup>11</sup> Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet Ke-1, hal. ii

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil (suara) yang maksimal di pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat<sup>12</sup>

Salah satu partai yang menjadi peserta pada pemilihan legislatif (Pileg) pada tahun 2014 lalu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang berlambang Ka'bah ini merupakan partai yang berlandaskan agama Islam sebagai tonggak utama, didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 dan merupakan gabungan dari hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Jadi wajar jika partai PPP kini memproklamirkan sebagai “Rumah Besar Umat Islam”.<sup>13</sup>

Sebagai partai yang berlandaskan agama Islam sebagai landasan utama dan mengatasnamakan sebagai partai Islam, untuk persoalan rancangan strategi politik, partai PPP sudah pasti mengedepankan asas-asas Islam, namun apakah penerapan strategi politik partai PPP pada Pemilihan Legislatif 2014 lalu sudah menerapkan asas-asas Islam, dan seperti apa strategi partai berlambang ka'bah tersebut yang seyogyanya harus mengaju kepada syari'at agama Islam.

Pelaksanaan pemilihan legislatif pada tahun 2014 di Kabupaten Kuantan Singingi, partai persatuan pembangunan (PPP) memperoleh suara jauh lebih kecil dibandingkan dengan peroleh suara partai golongan karya

<sup>12</sup> Schroder, Peter. *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2010), hal. 6

<sup>13</sup> [www.ppp.go.id](http://www.ppp.go.id) (*Sejarah Partai PPP*)

(Golkar) yang cukup banyak. Berikut perolehan suara pemilihan legislatif kabupaten Kuantang Singingi dalam bentuk tabel.:

<b>Dapil I</b> <b>(Kuantan Tengah , Sentajo Raya dan Benai)</b>			<b>Dapil III</b> <b>( Pangean, LTD, KH, KHS, Inuman dan Cerenti )</b>		
No.	Parpol	Jumlah	No.	Parpol	Jumlah
1	Nasdem	3.689	1	Nasdem	3.233
2	PKB	2.156	2	PKB	3.689
3	PKS	2.002	3	PKS	2.064
4	PDIP	1.464	4	PDIP	3.211
5	Golkar	14.322	5	Golkar	14.152
6	Gerindra	7.336	6	Gerindra	5.820
7	Demokrat	5.773	7	Demokrat	3.426
8	PAN	3.059	8	PAN	5.161
9	PPP	3.227	9	PPP	3.788
10	Hanura	1.972	10	Hanura	3.434
11	PBB	3.115	11	PBB	5.061
12	PKPI	3.300	12	PKPI	2.585
Total Suara Sah		51.465	Total Suara Sah		55.624
Jumlah Pemilih		69.606	Jumlah Pemilih		75.128
Pegguna Hak Pilih		52.479	Pegguna Hak Pilih		57.320

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapil II ( Singingi dan Singingi Hilir )			Dapil IV ( GT, HK, KM dan Pucuk Rantau )		
No.	Parpol	Jumlah	No.	Parpol	Jumlah
1	Nasdem	778	1	Nasdem	2.478
2	PKB	3.577	2	PKB	2.661
3	PKS	1.151	3	PKS	2480
4	PDIP	2.424	4	PDIP	2.165
5	Golkar	9.516	5	Golkar	7.578
6	Gerindra	3.728	6	Gerindra	1.913
7	Demokrat	5.692	7	Demokrat	1.378
8	PAN	1.611	8	PAN	3.004
9	PPP	2.626	9	PPP	3.873
10	Hanura	3.034	10	Hanura	2.054
11	PBB	2.046	11	PBB	3.080
12	PKPI	139	12	PKPI	1.450
Total Suara Sah		36.322	Total Suara Sah		32.114
Jumlah Pemilih		45.598	Jumlah Pemilih		43.656
Pegguna Hak Pilih		37.247	Pegguna Hak Pilih		32.833

Data diperoleh dari: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari tabel di atas tersebut dapatlah ditentukan peroleh kursi PPP dan partai Golkar tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2013 bahwa perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian perolehan kursi PPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2013 maka PPP hanya memperoleh 4 kursi dari total 35 calon legislatif yang di usung, nama-nama yang terpilih dari partai PPP tersebut yaitu:

1. Drs. Darmizar
2. Mustafa Sailila
3. Sardiono, A.Md
4. Naswanz<sup>14</sup>

Perolehan ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perolehan kursi partai golkar yaitu 9 kursi yaitu:

1. Andi Putra, SH
2. Muslim, S.Sos M.Si
3. Jons Ade Novendra
4. Komprensi, SP
5. H. Sutoyo
6. Adam, SH
7. Sastra Febriawan, S.Pi, M.Si
8. Asnidar, S.Pt
9. Andi Cahyadi<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Data diperoleh dari kantor komisi pemilihan umum kabupaten kuantan singing.

<sup>15</sup> Data diperoleh dari kantor komisi pemilihan umum kabupaten kuantan singing.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari jumlah perolehan suara partai peserta pemilihan legislatif DPRD kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan partai berlambang Ka'bah ini memang meraih suara terbanyak dibandingkan dengan partai politik islam lainnya, namun berada jauh dibawah partai Golkar yang meraih suara terbanyak. Suara yang diperoleh antara partai Golkar dengan partai PPP sangat besar, yang mana partai Golkar meraih 45.568 suara sedangkan PPP hanya memperoleh 13.514 suara, dengan jumlah total pemilih sah sebanyak 179.862 suara dari 238.012 suara.

Permasalahan dalam pembahasan ini adalah PPP sebagai partai berlandaskan agama Islam sebagai landasan utama dan mengatasnamakan sebagai partai Islam, yang juga merupakan partai Islam tertua di Indonesia belum mampu memperoleh suara terbanyak masyarakat kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas beragama Islam pada pemilihan legislatif tahun 2014 lalu, hal ini menarik bagi penulis, bagaimana dan seperti apa strategi yang diterapkan oleh partai PPP sehingga tidak mampu memperoleh suara terbanyak di daerah yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi politik dengan judul **“Strategi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyash”**.

Dalam hal ini, kajian mengenai strategi politik saat ini sangat dirasakan penting, dikarenakan banyaknya masalah-masalah yang sering

sekali terjadi ditubuh partai, mulai dari fungsi partai yang seharusnya penampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah sudah tidak dirasakan lagi oleh masyarakat luas justru sebaliknya yang terjadi hanya kepentingan partai yang diutamakan daripada kepentingan masyarakat, hal ini boleh jadi mempengaruhi perolehan suara pada pemilihan legislatif, kemudian masalah-masalah yang selalu terjadi pada saat pemilihan adalah *black campaign*, serangan fajar dan lain sebagainya yang dianggap sebagai strategi politik untuk memperoleh kemenangan. Selajutnya, dijadikannya dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi sebagai sasaran penelitian dikarenakan Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan partai berlandaskan agama Islam sebagai landasan utama dan mengatasnamakan sebagai partai Islam, untuk persoalan rancangan strategi politik mengedepankan asas-asas Islam, dan masyarakat kabupaten kuansing juga mayoritas beragama Islam tetapi PPP tidak berhasil memperoleh suara terbanyak pada masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam.

## **B. Batasan Masalah**

Dikarenakan banyaknya kejian mengenai partai politik, maka penulis membatasi penelitian ini yakni strategi politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan legislatif tahun 2014 perspektif fiqh siyasah. Selain dari hal-hal tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup kajian ini.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dilakukan penelitian dengan menitik beratkan kepada pokok permasalahan yaitu, bagaimanakah strategi politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan legislatif tahun 2014 perspektif fiqh siyasah. Dengan demikian untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi kepada sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan legislatif tahun 2014?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan legislatif tahun 2014?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui strategi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan (DPC PPP) pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mendapatkan mengetahui mengenai strategi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan (DPC PPP) pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis dan lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang artinya data-data atau dokumen-dokumen diperoleh dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuansing.

Adapun lokasi dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan (DPC PPP) terletak di Jalan Proklamasi, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi.

#### 2. Subjek dan Objek

- a. Subjek penelitian ini adalah pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris bendahara dan anggota yang membidangi penyusunan rencana dan strategi politik.
- b. Objek penelitian ini adalah strategi politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan legislatif tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang menjadi penelitian yang ditentukan sebelumnya.<sup>16</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 39 orang yang terdiri dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan sampelnya ditelaah dengan teknik *total sampling* (teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi).

### 4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu perorangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi dan buku yang berjudul *Al-Ahkam As-Sultahaniyyah* yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi sebagai rujukan untuk tinjauan Fiqih Siyasah.
- b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah dipublikasikan dalam hal ini dokumen-dokumen ataupun data lainnya terutama yang berhubungan dengan strategi politik partai

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 98

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan yang berhubungan dengan lokasi penelitian seperti profil DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi.

## c. Data Tertier

Data tertier adalah data pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti seperti kamus, undang-undang, ensiklopedi, dan lain sebagainya

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara atau interview, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi tentang hal-hal yang berhubungan dengan strategi politik pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan legislatif tahun 2014.
- b. Observasi yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti,<sup>17</sup> dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung bagaimana strategi politik pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu apabila terjadi perbedaan konsep yang ada diantara pengurus DPC PPP yang bersangkutan dengan teori yang ada.

<sup>17</sup> M.Hariwijaya dan Bisri M. Djaeani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, (Yogyakarta, Zenith Publizer, 2006), hal. 44

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti anggaran dasar anggaran rumah tangga, visi misi dan struktur DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Studi Pustaka yaitu dengan memperoleh berbagai informasi dari berbagai referensi seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Inti dari analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara spesifik dan diakui dalam prespektif ilmiah.<sup>18</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, dan akurat tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang diperoleh untuk dianalisis, kemudian dikaji dalam perspektif fiqh siyasah dan diambil kesimpulan.

#### 7. Teknik Penulisan

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

<sup>18</sup> Sitorus, MTF, *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*, (Bogor: KDIS, 1998), hal. 45

- b. Metode induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif adalah setelah semua data telah berhasil terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberika gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan dalam penelitian ini dan mudah untuk memahaminya, maka penulis menguraikan secara singkat masing-masing bab. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas dalam bab I ini adalah gambaran secara umum apa latar belakang dan masalah yang di teliti oleh penulis serta bagaimana sistem penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II menguraikan tentang gambaran umum Profil Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi sejarah singkat, kondisi sosial dan budaya masyarakat Kuantan Singingi, visi misi dan lambang daerah. Serta menguraikan tentang gambaran umum Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi yang

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi: sejarah singkat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi, visi misi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi, struktur Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi.

Bab III membahas tentang tinjauan umum strategi politik dan strategi politik dalam Fiqih Siyasah yang meliputi: pengertian politik, sejarah partai politik, dasar hukum partai politik, fungsi partai politik, strategi partai politik dan strategi politik dalam fiqih siyasah.

Bab IV memaparkan tentang strategi politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014.

Bab V ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang menguraikan tentang kesimpulan dan sara terhadap hasil penelitian yang diharapkan memberikan manfaat bagi semuanya khususnya penulis dan juga pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kuantan Singingi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.